

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Akuntansi**

Akuntansi memegang peranan penting dalam entitas karena akuntansi adalah bahasa bisnis (*bussnines language*). Akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu. Informasi akuntansi tersebut digunakan oleh para pemakai agar dapat membantu dalam membuat prediksi kinerja di masa mendatang.

##### **2.1.1.1 Pengertian Akuntansi**

Banyak para ahli mengemukakan definisi tentang akuntansi, berikut ini merupakan beberapa ahli yang mengemukakan pengertian dari akuntansi. Pengertian akuntansi menurut Mulyadi (2008:1) adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, pemeriksaan dan penyajian dengan cara-cara tertentu, transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi lain serta penafsiran terhadap hasilnya”.

Sedangkan pengertian akuntansi menurut Warren Reeve (2008:10) yang diterjemahkan oleh Aria Farahwati adalah sebagai berikut:

“Akuntansi didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktifitas ekonomi dan kondisi perusahaan.”

Pengertian akuntansi menurut Agus Mahfudz dan Sri Nur Mulyani (2009:136) adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penelitian dan pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan tersebut”.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah sebuah sistem yang menghasilkan laporan keuangan dan memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

#### **2.1.1.2 Akuntansi Keuangan**

Pengertian akuntansi keuangan menurut Warren Reeve (2008:15) dalam Aria Farahwati adalah sebagai berikut:

“Akuntansi keuangan adalah pencatatan dan pelaporan data serta kegiatan ekonomi perusahaan. Walaupun laporan tersebut menghasilkan informasi yang berguna bagi manajer namun hal ini merupakan laporan utama bagi pemilik, kreditor, lembaga pemerintah dan masyarakat.”

Sedangkan pengertian akuntansi keuangan menurut Kieso (2008:2) dalam Handikad Wasilah adalah sebagai berikut:

“Akuntansi keuangan adalah sebuah proses yang berakhir pada pembuatan laporan keuangan menyangkut perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan baik pihak-pihak internal maupun pihak-pihak eksternal.”

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi keuangan adalah suatu pencatatan dan pelaporan informasi keuangan perusahaan untuk kepentingan-kepentingan pihak internal maupun pihak eksternal.

Prinsip akuntansi yang berlaku umum merupakan suatu urutan atau hirarki ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perlakuan akuntansi yang dapat disajikan sebagai acuan pencatatan suatu transaksi. Ketentuan-ketentuan tersebut biasanya disusun dari suatu pengaturan yang merupakan ketentuan konseptual yang bersifat filosofis hingga ketentuan yang bersifat praktis dan teknis (SAK:2009)

Akuntansi keuangan berorientasi pada pelaporan pihak eksternal. Beragamnya pihak eksternal dengan tujuan spesifik bagi masing-masing pihak membuat pihak penyusun laporan keuangan menggunakan prinsip dan asumsi-asumsi dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk itu diperlukan standar akuntansi yang dijadikan pedoman baik oleh penyusun maupun oleh pembaca laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan dari akuntansi keuangan berupa laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) (Martani, 2012:8).

### **2.1.1.3 Sistem Informasi Akuntansi**

Sistem informasi akuntansi menurut Azhar Susanto (2008:72) adalah sebagai berikut:

“Sistem Informasi Akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan (integrasi) dari sub sistem/komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan.”

Sedangkan menurut Baridwan (2009:4) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:

“Sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah sistem yang terdiri dari beberapa sub sistem yang digunakan oleh organisasi untuk mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisa dan mengkomunikasikan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan pihak manajemen dalam merencanakan dan mengendalikan perusahaan.

Ada tiga tujuan dasar penerapan yang umum pada sistem informasi akuntansi menurut Hall (2007:21) dalam Amir Abadi Yusuf antara lain:

1. Mendukung fungsi penyediaan pihak manajemen. Administrasi mengacu pada tanggung jawab pihak manajemen untuk mengelola dengan baik sumber daya perusahaan. Sistem menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ke para pengguna eksternal melalui laporan keuangan. Secara internal, pihak manajemen menerima informasi pelayanan dari berbagai laporan pertanggung jawaban.
2. Mendukung pengambilan keputusan pihak manajemen. Sistem informasi memberikan pihak manajemen informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab pengambilan keputusan tersebut.
3. Mendukung operasional harian perusahaan. Sistem informasi menyediakan informasi bagi para personel operasional untuk membantu mereka melaksanakan pekerjaannya dalam cara yang efisien dan efektif.

## 2.1.2 *Good Corporate Governance*

### 2.1.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan atau *agency theory* merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *Good Corporate Governance*. Konsep GCG timbul berkaitan dengan *principal-agent theory*, yaitu untuk menghindari konflik antara *principal* dan *agent*-nya ([www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id), 2012). Konflik muncul karena perbedaan kepentingan tersebut haruslah dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian pada para pihak. Teori agensi menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga ahli (*agent*) yang lebih mengerti dalam menjalankan pengelolaan perusahaan (Sutedi, 2011).

Pengertian *agency theory* menurut Anthony dan Govindarajan (2005:269), adalah sebagai berikut:

“Teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*.”

Sedangkan pengertian teori keagenan menurut Gudono (2009:176) sebagai berikut:

“Teori keagenan (*agency theory*) dibangun sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah yang muncul manakala ada kesenjangan informasi dalam kontrak (perikatan) antara prinsipal (pemberi kerja) dengan agen (penerima perintah).”

Dengan demikian teori keagenan merupakan konsep dasar yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals*, yaitu pihak yang memberikan mandat kepada pihak *agent* yang merupakan pihak yang menerima

perintah, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal* dalam kepastiannya sebagai pengambilan keputusannya. Sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah yang muncul manakala ada kesenjangan informasi dalam kontraktual tersebut.

Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu adanya masalah keagenan. Menurut Gudono (2012:148), terdapat dua macam bentuk masalah keagenan yang terdapat dalam hubungan prinsipal dan agen, yaitu:

“1. Pilihan Buruk (*Adverse Selection* atau *Negative Selection*)

2. Bencana Moral (*Moral Hazard*)

Pilihan buruk terjadi saat prinsipal tidak mengetahui kemampuan agen, dan karena itu prinsipal dapat membuat pilihan yang buruk mengenai agen. Sedangkan, bencana moral terjadi saat kontrak yang sudah disetujui oleh prinsipal dan agen, namun agen memiliki informasi lebih yang tidak memenuhi persyaratan (*term*) dari kontrak tersebut. Sehingga manajemen mendapatkan fasilitas yang berlebih. Hal ini terjadi karena manajemen mengetahui lebih banyak informasi mengenai perusahaan dan merasa tindakannya tersebut tidak diketahui oleh pemegang saham.”

Permasalahan keagenan dapat ditunjukkan menggunakan beberapa model (Gudono, 2012:153), model-model tersebut dirancang sesuai dengan alur pikir sebagai berikut:

- “1. Agen adalah rasional, dalam arti memiliki informasi yang cukup lengkap dan ingin memaksimalkan fungsi utilitasnya sendiri.
2. Prinsipal berusaha memotivasi agen agar mengeluarkan *effort* yang besar dengan cara memberi *reward* pada agen sehingga saat agen menunjukkan usahanya tujuan prinsipal untuk mendapat output optimal dari agen tercapai.

3. *Reward* untuk agen tergantung pada output yang dihasilkan dan output tersebut juga tergantung pada jumlah usaha yang dilakukan agen.
4. Agen memiliki “target” (*utility reservation*) tertentu dalam arti agen hanya akan bekerja jika *reward* yang diterima dari prinsipal sesuai.”

Penulis lain, Miller (2005) dalam Gudono (2012:156) berpendapat ada enam asumsi dalam teori keagenan, sebagai berikut:

- “1. Tindakan agen mempengaruhi hasil yang didapatkan oleh prinsipal.
2. Karena prinsipal tidak bisa melihat tindakan agen, maka prinsipal harus menggunakan *outcome* sebagai indikasi tindakan agen.
3. Preferensi agen tidak sama dengan preferensi prinsipal.
4. Prinsipal adalah aktor yang rasional.
5. Baik prinsipal maupun agen sama-sama memahami rasionalitas agen.
6. Prinsipal memiliki *bargaining power* saat menetapkan kontrak dengan agen.”

Perencanaan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan pemilik dalam hal konflik kepentingan inilah yang merupakan inti dari *agency theory*. Namun untuk menciptakan kontrak yang tepat merupakan hal yang sulit diwujudkan. Oleh karena itu, suatu cara yang di gunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku oportunistik manajemen adalah dengan menerapkan mekanisme *Good Corporate Governance*.

Teori agensi tersebut mendorong munculnya konsep GCG dalam pengelola bisnis perusahaan, dimana GCG diharapkan dapat meminimumkan hal-hal tersebut melalui pengawasan terhadap kinerja para *agent*. GCG memberikan jaminan kepada para pemegang saham bahwa dana yang diinvestasikan dikelola dengan baik dan para *agent* bekerja sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan untuk kepentingan perusahaan.

### 2.1.2.2 Definisi *Good Corporate Governance*

Kata *governance* berasal dari bahasa Perancis, *gubernance* yang berarti pengendalian. Selanjutnya kata tersebut dipergunakan dalam konteks kegiatan perusahaan atau jenis organisasi yang lain, menjadi *coporate governance*. Dalam bahasa Indonesia *corporate governance* diterjemahkan sebagai tata kelola atau tata pemerintahan perusahaan (Sutojo dan Aldridge, 2008:5). *Good corporate governance* (GCG) menurut Arief Effendi (2009:1) adalah sebagai berikut:

“GCG adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.”

Sedangkan pengertian *Corporate Governance* menurut *Indonesian institute of Corporate Governance* (IICG, 2010) adalah sebagai berikut:

“*Corporate governance* sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain. *Corporate governance* juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja.”

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan para pemegang saham, mengamankan aset perusahaan, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan.



### 2.1.2.3 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Setiap perusahaan harus memberikan kepastian atas penerapan prinsip atau asas GCG di setiap aspek bisnisnya. Menurut KNKG (2006), prinsip-prinsip GCG terdiri dari transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

#### 1. Transparansi (*Transparency*)

Prinsip dasar:

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah di akses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Pedoman pokok pelaksanaannya:

- a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham

pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen resiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

## 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip dasar:

Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Pedoman pokok pelaksanaannya:

- a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak perusahaan yang bersangkutan dan semua

karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.

- b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua pihak perusahaan yang berkepentingan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap pihak perusahaan yang bersangkutan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

### 3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip dasar:

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Pedoman pokok pelaksanaannya:

- a. Pihak-pihak perusahaan yang berkepentingan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).
- b. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4. Independensi (*Independency*)

Prinsip dasar

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Pedoman pokok pelaksanaannya:

- a. Masing-masing pihak perusahaan yang bersangkutan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- b. Masing-masing karyawan perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan

perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip dasar:

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Pedoman pokok pelaksanaannya:

- a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

#### 2.1.2.4 Mekanisme *Good Corporate Governance*

Dalam suatu pelaksanaan aktivitas perusahaan, prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dituangkan dalam suatu mekanisme. Mekanisme ini dibutuhkan agar aktivitas perusahaan dapat berjalan secara sehat sesuai dengan arah yang ditetapkan. Menurut Mas Achmad Daniri (2005:8), mekanisme *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

“Suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan dan perundangan dan norma yang berlaku.”

Mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan komisaris independen. Masing-masing mekanisme tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. **Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Organisasi memiliki kemampuan untuk bertahan apabila terdapat pemisahan antara pemilik dan pengendalinya. Struktur kepemilikan saham dalam suatu perusahaan dapat terdiri atas kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi dan kepemilikan saham oleh manajerial. Institusi sebagai pemilik saham dianggap lebih mampu dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi. Hal ini dikarenakan investor institusi lebih berpengalaman dibandingkan dengan investor individual. Dengan

demikian akan semakin membatasi manajemen dalam memainkan angka-angka dalam laporan keuangan (Sriwedari, 2009).

Adanya monitoring yang efektif oleh pihak institusional menyebabkan penggunaan utang menurun. Hal ini karena peranan utang sebagai salah satu alat monitoring sudah diambil alih oleh kepemilikan institusional. Tindakan monitoring oleh pihak investor institusional dapat mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri yang dilakukan oleh manajer sehingga manajer dapat lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan (Oktadella dan Zulaikha, 2011).

Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan.

Kepemilikan institusional memiliki kelebihan yaitu memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi serta memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

## 2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan persentase saham yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan

perusahaan yang meliputi komisaris dan direksi. Kepemilikan manajemen merupakan salah satu mekanisme yang dipergunakan agar pengelola melakukan aktivitas sesuai kepentingan pemilik perusahaan. Kepemilikan manajerial dimaksudkan untuk memberi kesempatan manajer terlibat dalam kepemilikan saham, sehingga kedudukan manajer sejajar dengan pemilik perusahaan (Oktadella dan Zulaikha, 2010). Kepemilikan manajerial merupakan salah satu isu penting dalam teori keagenan sejak dipublikasikan oleh Jensen dan Meckling (1976:315) dalam Sriwedari (2009), yang menyatakan bahwa dengan semakin besarnya proporsi kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan maka manajemen akan berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adalah dirinya sendiri. Sedangkan menurut Widarjo *et al.*, (2010) kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus pemilik atau pemegang saham perusahaan. Manajer yang memiliki saham dalam perusahaan akan berusaha meningkatkan kinerja perusahaan, karena dengan meningkatnya laba perusahaan maka insentif yang diterima oleh manajer akan meningkat pula. Sebaliknya apabila kepemilikan manajer turun, maka biaya keagenannya akan meningkat. Hal ini dikarenakan manajer akan melakukan tindakan yang tidak memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, manajer akan cenderung memanfaatkan sumber-sumber perusahaan untuk kepentingan sendiri.



Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain dirinya sendiri. Kepemilikan perusahaan juga terkait dengan pengendalian operasional perusahaan. Dengan semakin besarnya kepemilikan manajer, maka manajer dapat lebih leluasa dalam mengatur pemilihan metode akuntansi, serta kebijakan-kebijakan akuntansi penting terkait dengan masa depan perusahaan (Oktadella dan Zulaikha, 2010).

### 3. Komite Audit

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen (KNKG, 2006). Peraturan mengenai komite audit dikeluarkan oleh Bapepam pada Mei 2000, melalui SE/03/PM/2000, Keputusan Ketua Bapepam Kep-29/PM/2004, Peraturan Bapepam-LK No. IX 1.5, Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012. Berdasarkan peraturan ini dijelaskan bahwa komite audit harus memiliki sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, seorang diantaranya merupakan komisaris independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedang anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen

dimana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan atau keuangan.

Tujuan pembentukan komite audit adalah memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum, memastikan bahwa internal kontrol perusahaan memadai, menindaklanjuti dugaan adanya penyimpangan yang material di bidang keuangan dan implikasi hukumnya, dan merekomendasikan seleksi auditor eksternalnya (Jama'an, 2008).

#### 4. Komisaris Independen

Di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (*Task Force Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance*). Kehadiran komisaris independen dalam dewan dapat menambah kualitas aktivitas pengawasan dalam perusahaan, karena mereka tidak terafiliasi dengan perusahaan sebagai pegawai (Andarini dan Januarti, 2010).

Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan berfungsi untuk

mengawasi dan melindungi pihak-pihak diluar manajemen perusahaan, menjadi penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen, sehingga komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance* dan menghasilkan laporan keuangan yang berintegritas tinggi (Susiana dan Herawaty, 2007).

#### **2.1.2.5 Faktor Keberhasilan Penerapan *Good Corporate Governance***

Menurut KNKG (2009), keberhasilan pelaksanaan GCG pada perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain:

- “1. Komitmen dari organ perusahaan yang dilandasi oleh itikad baik untuk menerapkan GCG secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan.
2. Penciptaan sistem pelaksanaan GCG di semua lapisan serta melakukan deseminasi dan sosialisasi secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan mengikutsertakan semua pihak yang ada dalam perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Penyesuaian peraturan dan kebijakan perusahaan dengan sistem pelaksanaan GCG.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seluruh jajaran perusahaan yang mengacu pada pedoman perilaku (*code of conduct*).
5. Dukungan dari pihak *stakeholders*.
6. Evaluasi pelaksanaan GCG yang dilakukan berkala oleh perusahaan sendiri maupun dengan menunjuk pihak lain yang kompeten dan independen.”

#### **2.1.2.6 Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance***

Prinsip *Good Corporate Governance* diharapkan menjadi titik rujukan pembuat kebijakan (pemerintah) dalam membangun kerangka kerja penerapan

*Corporate Governance*. Bagi pelaku usaha dan pasar modal, prinsip ini dapat menjadi pedoma mengelaborasi praktek terbaik bagi peningkatan nilai dan keberlangsungan perusahaan. Dalam keputusan BUMN Nomor: Kep.117/M-MBU/2000 diutarakan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN, bertujuan untuk :

1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan investasi nasional.
6. Menyukseskan program privatisasi.

Penerapan *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya *Corporate Governace* dapat meningkatkan kepercayaan

investor. *Corporate Governance* yang buruk menurunkan tingkat kepercayaan investor, lemahnya praktik *Good Governance* merupakan salah satu faktor yang memperpanjang krisis ekonomi di negara kita.

Di samping hal tersebut *Corporate Governance* juga mempunyai manfaat. Menurut FCGI (2001) manfaat dari penerapan GCG adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen.

Manfaat *Good Corporate Governance* (GCG) ini bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya perusahaan sekaligus pilar pemenang era persaingan global.

### **2.1.3 Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Terdapat berbagai proksi yang biasanya digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan, yaitu jumlah karyawan, total aset, jumlah penjualan, dan

kapitalisasi pasar. Semakin besar aset maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat (Sudarmadji dan Sularto, 2007).

Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan yang lebih luas sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Semakin besar suatu perusahaan, maka perusahaan akan menghadapi biaya politik yang tinggi, perusahaan besar akan menghadapi tuntutan lebih besar dari para *stakeholder* untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan (Nuryaman, 2009)

UU No. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total *asset* yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut.

Aset total dapat menggambarkan ukuran perusahaan, semakin besar aset biasanya perusahaan tersebut semakin besar (Prasetyantoko, 2008:257). Penelitian ukuran perusahaan dapat menggunakan tolak ukur Asset. Karena total Asset perusahaan bernilai besar maka hal ini dapat disederhanakan dengan mentransformasikan ke dalam logaritma natural (Ghozali, 2006); sehingga ukuran perusahaan juga dapat dihitung dengan:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln \text{ Total Asset}$$

## **2.1.4 Integritas Laporan Keuangan**

### **2.1.4.1 Pengertian Integritas Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan bagian terpenting dalam membangun kelangsungan perusahaan. Mengingat pentingnya fungsi laporan keuangan tersebut, manajemen perusahaan perlu menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi nilai integritas. Mulyadi (2004) mendefinisikan integritas adalah prinsip moral yang tidak memihak, jujur, seseorang yang berintegritas tinggi memandang fakta seperti apa adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya. Pada penelitian Mayangsari (2003) integritas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur.

Laporan keuangan seharusnya memberikan informasi yang berguna. Informasi akuntansi harus memenuhi tiga karakteristik kualitatif informasi akuntansi yaitu *relevance*, *objectivity* dan *reability*. Informasi dikatakan *relevance* apabila dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan menguatkan atau mengubah pengharapan pengguna laporan keuangan. Informasi dikatakan *reliable* apabila dapat dipercaya dan menyebabkan pemakai laporan keuangan bergantung pada informasi tersebut. Sedangkan dikatakan *objective* apabila informasi tersebut terbebas dari pengaruh hal lain yang dapat mempengaruhi independensi informasi. Integritas laporan keuangan dapat dicapai apabila laporan keuangan mampu memberikan informasi yang memiliki karakteristik-karakteristik tersebut (Jama'an, 2008).

#### 2.1.4.2 Pengukuran Integritas Laporan Keuangan

Ukuran integritas laporan keuangan selama ini belum ada walaupun demikian secara intuitif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu diukur dengan konservatisme serta keberadaan manipulasi laporan keuangan yang biasanya diukur dengan manajemen laba. Laporan keuangan yang *reliable* atau berintegritas dapat dinilai dengan cara penggunaan prinsip konservatisme dan penggunaan *earning management* karena informasi dalam laporan keuangan akan lebih *reliable* apabila laporan keuangan tersebut konservatif dan laporan keuangan tersebut tidak *overstate* supaya tidak ada pihak yang dirugikan akibat informasi dalam laporan keuangan tersebut (Mayangsari, 2003).

Konservatisme sebagai sikap berhati-hati dalam menghadapi risiko dengan mengorbankan sesuatu guna meminimalkan atau menghilangkan risiko (Suwardjono, 2008:245). Konservatisme sebagai prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aktiva dan laba serta segera mengakui kerugian dan hutang yang mempunyai kemungkinan yang terjadi. Penerapan prinsip ini mengakibatkan pilihan metode akuntansi ditujukan pada metode yang melaporkan laba atau aktiva yang lebih rendah serta melaporkan hutang lebih tinggi. Dengan demikian, pemberi pinjaman akan menerima perlindungan atas risiko menurun (*downside risk*) dari neraca yang menyajikan aset bersih dan laporan keuangan yang melaporkan berita buruk secara tepat waktu (Watts dalam Haniati dan Fitriany, 2010).



Konservatisme juga akan membatasi kerugian yang muncul dari keputusan investasi yang berkinerja buruk, sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. Tujuan dari penggunaan konsep konservatisme adalah untuk menetralkan optimisme para usahawan yang terlalu berlebihan dalam melaporkan hasil usahanya (Ahmed dan Duellman, 2007).

Munculnya praktik konservatisme tersebut karena standar akuntansi yang berlaku menginginkan perusahaan memilih salah satu metode akuntansi yang dirasa paling tepat (Widya, 2005). Setiap metode akuntansi mempunyai tingkat konservatisme yang berbeda. Jama'an (2008) berpendapat bahwa perbedaan pemilihan metode akuntansi berpengaruh terhadap angka-angka yang disajikan baik dalam neraca maupun laporan laba-rugi perusahaan.

Pengukuran integritas laporan keuangan yang diprosikan dengan konservatisme dimana ditentukan menggunakan asumsi metode perusahaan yang digunakan yaitu metode persediaan, penyusutan, metode amortisasi, dan pengakuan biaya riset (Widya, 2005). Asumsi pertama yaitu perusahaan yang menggunakan metode persediaan rata-rata akan lebih konservatif dibandingkan dengan yang menggunakan metode FIFO. Dalam neraca fiskal hanya mengakui dua metode penilaian persediaan, yaitu FIFO (*First In First Out*) dan metode rata-rata tertimbang. Diantara kedua metode tersebut, metode rata-rata tertimbang dinilai sebagai metode yang paling konservatif karena menghasilkan biaya persediaan akhir yang lebih kecil sehingga harga pokok penjualan menjadi lebih besar dan laba yang dihasilkan menjadi lebih kecil.

Asumsi kedua yaitu perusahaan yang menggunakan metode penyusutan saldo menurun relatif lebih konservatif dibanding dengan perusahaan yang menggunakan metode garis lurus. Berdasarkan waktunya, jika periode penyusutan suatu perusahaan semakin pendek, maka akan lebih konservatif, dan sebaliknya (Dewi, 2004). Hal tersebut dikarenakan jika periode penyusutan semakin pendek, maka biaya penyusutan tiap periode menjadi lebih besar sehingga laba yang dihasilkan menjadi lebih kecil. Metode penyusutan saldo menurun dinilai lebih konservatif dibanding garis lurus karena menghasilkan biaya penyusutan yang lebih besar sehingga menghasilkan laba yang lebih kecil.

Asumsi yang ketiga yaitu perusahaan yang menggunakan metode amortisasi saldo menurun relatif lebih konservatif dibanding dengan perusahaan yang menggunakan metode garis lurus. Sama halnya dengan penyusutan, semakin pendek periode amortisasi maka akan semakin konservatif dan sebaliknya. Metode amortisasi saldo menurun relatif lebih konservatif karena metode ini menghasilkan biaya amortisasi yang lebih besar sehingga menghasilkan laba yang lebih kecil.

Asumsi yang keempat yaitu perusahaan yang mengakui biaya riset dan pengembangan sebagai biaya pada tahun berjalan akan cenderung lebih konservatif dibanding perusahaan yang mengakui biaya riset dan pengembangan sebagai aktiva. Biaya riset dan pengembangan memungkinkan perusahaan untuk memilih metode yang lebih sesuai dengan keadaan perusahaan. Laporan keuangan akan menjadi lebih konservatif jika biaya riset dan pengembangan diakui sebagai beban daripada sebagai aktiva. Biaya riset dan pengembangan yang diakui sebagai

beban mengakibatkan laba yang dihasilkan menjadi lebih kecil sedangkan apabila diakui sebagai aktiva akan memperbesar laba yang dihasilkan.

Konservatisme dalam penelitian ini diukur menggunakan *C-Score*/indeks konservatisme (Mayangsari, 2003). Berikut ini merupakan langkah-langkahnya:

$$C_{it} = \frac{(RP_{res\ it} + DEPR_{res\ it})}{NOA_{it}}$$

Keterangan:

$C_{it}$  = Indeks *conservatism* perusahaan  $i$  pada tahun  $t$ .

$RP_{it}$  = Jumlah biaya riset dan pengembangan yang ada dalam laporan keuangan perusahaan  $i$  pada tahun  $t$ .

$DEPR_{it}$  = Biaya depresiasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan  $i$  pada tahun  $t$ .

$NOA_{it}$  = *Net Operating Assets*, yang diukur dengan rumus kewajiban keuangan bersih (total utang + total saham + total dividen) – (kas + total investasi) perusahaan  $i$  pada tahun  $t$ .

Komponen biaya riset dan pengembangan menurut PSAK No. 20 meliputi:

- a. Upah, gaji dan biaya pegawai lainnya yang terlibat dalam kegiatan riset dan pengembangan.
- b. Biaya bahan dan jasa yang dikonsumsi dalam kegiatan riset dan pengembangan.

- c. Penyusutan properti, pabrik, dan peralatan yang digunakan untuk kegiatan riset dan pengembangan.
- d. Biaya overhead, diluar biaya administrasi umum, yang berhubungan dengan kegiatan riset dan pengembangan.
- e. Biaya-biaya lain, seperti amortisasi paten dan lisensi, bila aset-aset tersebut digunakan dalam kegiatan riset dan pengembangan.

#### **2.1.4.3 Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2011) adalah:

“Memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”.

Kemudian menurut Dwi Prastowo (2011:5), menambahkan tujuan laporan keuangan yaitu:

“Untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Di mana informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan sangat diperlukan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta waktu kepastian dari hasil tersebut”.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas. Informasi tersebut

beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan dan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

#### **2.1.4.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan**

*International Accounting Standard Board* (IASB) menetapkan dua *fundamental qualities* yang harus dimiliki informasi yang termuat dalam laporan keuangan agar berguna dalam pembuatan keputusan ekonomi, yaitu *relevance* dan *faithful representation*. Selain itu, dalam kerangka konseptual yang dikembangkannya ditetapkan pula kualitas lainnya yang dapat meningkatkan kegunaan informasi keuangan meliputi *comparability*, *variability*, *timeliness*, dan *understandibility* (Kieso *et al.*, 2011: 43-44).

##### 1) *Fundamental Qualities*

###### a) Keberpautan (*Relevance*)

Keberpautan (*relevance*) merupakan kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam membedakan beberapa alternatif keputusan sehingga pemakai dapat dengan mudah menentukan pilihan. Berkaitan dengan tujuan pelaporan keuangan keberpautan berarti informasi dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi masa lalu (Suwardjono, 2008:169). Informasi yang relevan harus mengandung *predictive value* yang membantu peramalan hasil-hasil yang diperoleh pada masa depan.

Selain itu, informasi yang relevan juga harus memuat syarat *confirmatory value*, yaitu dapat dipakai untuk mengonfirmasi nilai ekspektasi yang telah ditetapkan sebelumnya (Kieso *et al*, 2011: 44).

b) Ketepatan Penyimbolan (*Faithful Representation*)

Ketepatan penyimbolan merupakan kesesuaian antara pengukur atau representasi dan fenomena yang diukur. Dalam akuntansi, fenomena yang ingin diukur adalah kondisi fisis, kondisi keuangan, dan kegiatan ekonomik badan usaha berupa sumber ekonomik, kewajiban keuangan, dan transaksi yang dapat mengubah sumber ekonomik dan kewajiban tersebut (Suwardjono, 2008:171). *Faithful representatif* berarti bahwa informasi disajikan secara tulus dan jujur dengan menggambarkan realitas ekonomi yang sesungguhnya. Untuk menjadi informasi yang bersifat *faithful representation*, informasi harus disajikan secara lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Kelengkapan (*completeness*) berarti penyediaan seluruh informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan secara lengkap sehingga tidak menyesatkan para penggunanya. Informasi dikatakan netral (*neutrality*) apabila bebas dari upaya untuk mengutamakan kepentingan kelompok tertentu atau memberikan keuntungan kepada pihak tertentu. Informasi keuangan juga harus terbebas dari kesalahan material (*Free from error*) yang dapat menyesatkan para pengguna untuk memenuhi kualitas *faithful representatif* (Kieso *et al*, 2011:44).

## 2) *Enhancing Qualities*

### a) Keterbandingan (*Comparability*)

Keterbandingan (*comparability*) sebagai kemampuan informasi untuk membantu pengguna dalam mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua fenomena ekonomik (Suwardjono, 2008:175). Untuk keperluan perbandingan, pengukuran dan penyajian harus dilakukan secara konsisten dari satu periode ke periode berikutnya (Kieso *et al*, 2011:46).

### b) Keterujian (*Veriability*)

Keterujian merupakan kemampuan informasi untuk memberi keyakinan yang tinggi kepada para pengguna mengenai kebenaran informasi tersebut melalui pengujian secara independen (Suwardjono, 2008:173).

### c) Ketepatanwaktuan (*Timeliness*)

Ketepatanwaktuan merupakan ketersediaan informasi pada saat dibutuhkan pemakai guna pengambilan keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan (Suwardjono, 2008:170).

### d) Keterpahaman (*Understandibility*)

Keterpahaman merupakan kemampuan informasi untuk dapat dicerna oleh para penggunanya yang ditentukan oleh dua faktor, yaitu pengguna dan informasi itu sendiri (Suwardjono, 2008:168). Keterpahaman dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan apabila

informasi yang dimuat *classified, characterized, dan presented clearly and concisely* (Kieso *et al*, 2011:47).

#### **2.1.4.5 Faktor yang Memengaruhi Integritas Laporan Keuangan**

##### **A. Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Investor institusional merupakan investor yang berpengalaman sehingga dapat melaksanakan fungsi pengawasan dengan lebih efektif dan tidak mudah diperdaya oleh tindakan manajer seperti manipulasi penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, keberadaan investor institusional dapat meningkatkan integritas laporan keuangan (N. P. Yani W. dan Budiarta, 2014). Akan tetapi, fokus investor institusional pada laba saat ini menyebabkan investor institusional tidak optimal dalam melaksanakan pengawasan (Tia Astria, 2011).

##### **B. Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial merupakan situasi dimana manajer memiliki peran ganda sebagai pengelola sekaligus pemegang saham dalam suatu perusahaan (Joshua Tarigan, 2007). Kepemilikan saham oleh manajemen dipandang sebagai mekanisme yang efektif guna menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajemen. Akan tetapi, kepemilikan saham oleh manajemen yang terlalu tinggi dapat melemahkan integritas laporan keuangan.



Peran ganda yang dimiliki manajemen sebagai pengelola sekaligus pemilik perusahaan dapat menimbulkan kendali yang lebih besar terhadap perusahaan. Kondisi ini memicu munculnya sikap oportunistik manajemen yang bertindak dengan mengutamakan kepentingannya sendiri (Tia Astria, 2011).

### C. Komite Audit

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen (KNKG, 2006).

Komite Audit bermanfaat untuk menjamin transparansi, keterbukaan laporan keuangan, keadilan untuk semua *stakeholder* dan pengungkapan semua informasi yang dilakukan oleh manajemen meskipun terdapat konflik kepentingan. Dengan demikian, komite audit dalam perusahaan dapat menjadi salah satu upaya dalam mengurangi manipulasi dalam penyajian informasi akuntansi sehingga keintegritasan laporan keuangan dapat meningkat (Nicolin dan Sabeni, 2013).

### D. Komisaris Independen

Di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham

pengendali serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (*Task Force Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance*). Kehadiran komisaris independen dalam dewan dapat menambah kualitas aktivitas pengawasan dalam perusahaan, karena mereka tidak terafiliasi dengan perusahaan sebagai pegawai (Andarini dan Januarti, 2010).

Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak- pihak lain yang terkait. Komisaris independen dapat menjadi penengah apabila terjadi perselisihan di antara manajer internal dan mengawasi kebijakan- kebijakan manajer serta memberikan nasihat kepada manajemen. Keberadaan komisaris independen pada satu perusahaan dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan yang dihasilkan manajemen (Susiana dan Herawati, 2007).

#### E. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Terdapat berbagai proksi yang biasanya digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan, yaitu jumlah karyawan, total aset, jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar aset maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat (Sudarmadji dan Sularto, 2007).

Perusahaan besar akan menghadapi tuntutan yang lebih besar dari *stakeholders* untuk menyajikan laporan dengan integritas yang tinggi. Selain itu, banyaknya sorotan terhadap perusahaan besar mendorong manajemen untuk mengungkapkan informasi secara jujur. Oleh karena itu, perusahaan besar akan menyajikan laporan keuangan dengan integritas yang tinggi (Jama'an, 2008).

### 2.1.5 Review Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut ini adalah penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
1.	Susiana dan Herawaty (2007)	Pengaruh Independensi, Mekanisme <i>Corporate Governance</i> , Kualitas Audit Terhadap Integritas laporan keuangan	Menggunakan data perusahaan publik yang terdaftar di BEI	Menambahkan variabel independen ukuran perusahaan.	Independensi, mekanisme <i>corporate governance</i> , kualitas audit mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap integritas laporan keuangan.
2.	Jama'an (2008)	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> , Kualitas Kantor Akuntan Publik Terhadap Integritas Laporan Keuangan	Menggunakan data perusahaan publik yang terdaftar di BEI	Menambahkan variabel independen ukuran perusahaan.	Kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas KAP berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Jumlah partner & izin usaha, audit <i>brand name</i> afiliasi berpengaruh tidak signifikan terhadap integritas laporan keuangan.
3.	Perwirasari (2009)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusi, Komite Audit, Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Kualitas Audit, Ukuran	Menggunakan data perusahaan publik yang terdaftar di BEI	Tahun penelitian	Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap Integritas laporan keuangan. Kepemilikan institusional, komite audit, dewan direksi, dewan komisaris, tenur audit, ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap

		Perusahaan Terhadap Integritas Laporan Keuangan			integritas laporan keuangan.
3.	Hardiningsih (2010)	Pengaruh Independensi, Komite Audit, Komisaris Independen, Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan	Menggunakan data perusahaan publik yang terdaftar di BEI	Menambahkan variabel independen ukuran perusahaan.	Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Independensi auditor, komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, dewan direksi, kualitas audit berpengaruh tidak signifikan terhadap integritas laporan keuangan.
4.	Oktadella dan Zulaikha (2011)	Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusi, Komite Audit, Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Kualitas Audit, Terhadap Integritas Laporan Keuangan	Menggunakan data perusahaan publik yang terdaftar di BEI. Metode analisis yang digunakan adalah regresi logistik.	Menambahkan variabel ukuran perusahaan.	Kepemilikan institusional, komite audit, kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Kepemilikan manajerial, komisaris independen, berpengaruh tidak signifikan terhadap integritas laporan keuangan.
5.	Putra dan Muid (2012)	Pengaruh Independensi, Mekanisme <i>Corporate Governance</i> , Kualitas Audit dan Manajemen Laba Terhadap Integritas Laporan Keuangan	Menggunakan data perusahaan publik yang terdaftar di BEI	Menambahkan variabel independen ukuran perusahaan.	Independensi, komite audit, kualitas audit dan manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Kepemilikan manajerial, komisaris independen, kepemilikan institusi berpengaruh tidak signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Setiap perusahaan mengeluarkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara benar dan jujur dengan

mengungkap fakta sebenarnya yang menjadi kepentingan banyak pihak. Dengan kata lain, laporan keuangan harus disajikan dengan integritas yang tinggi (Tia Astria, 2011).

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan. Penerapan tata kelola yang baik dapat menghasilkan integritas laporan keuangan yang terpercaya. Mekanisme *corporate governance* diukur dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen.

Adanya kepemilikan institusional, sebagai salah satu pengukuran mekanisme *corporate governance*, memiliki tujuan untuk menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan. Konflik kepentingan terjadi dimana terdapat kekuasaan tunggal suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan yang disajikan. Sedangkan kepemilikan manajemen berfungsi sebagai penyeimbang dalam kepemilikan saham. Adanya keikutsertaan manajemen dalam pengambilan keputusan perusahaan dapat memotivasi manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan sehingga dapat tercapai kinerja perusahaan yang diharapkan dan meningkatkan integritas laporan keuangan.

Integritas laporan keuangan sebuah perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh adanya komite audit, komisaris independen dalam perusahaan. Komite audit bertujuan agar laporan keuangan yang disajikan lebih jujur sehingga integritas laporan keuangan perusahaan dapat dipercaya. Sedangkan komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan pengambilan keputusan terutama untuk melindungi pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait.

Perusahaan yang memiliki komisaris independen cenderung akan menyajikan laporan keuangan yang lebih berintegritas karena terdapat badan yang mengawasi dan melindungi pihak-pihak diluar manajemen perusahaan.

Selain itu, ukuran perusahaan juga dapat berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Perusahaan berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan lebih luas sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Semakin besar perusahaan, maka perusahaan akan menghadapi tuntutan lebih besar dari para *stakeholder* untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih tepat waktu (Nuryaman, 2009).

## **2.2.1 Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Integritas Laporan Keuangan**

Berdasarkan penelitian sebelumnya mekanisme *good corporate governance* dalam penelitian ini meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan komisaris independen.

### **2.2.1.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Integritas Laporan Keuangan**

Kepemilikan institusional adalah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi. Gideon (2005) menyatakan persentase saham tertentu yang dimiliki institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen.

Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *oportunistik* atau mementingkan diri sendiri.

Kepemilikan institusional yang tinggi membatasi manajer untuk melakukan pengelolaan laba dan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa kepemilikan institusional dalam perusahaan dapat meningkatkan monitoring terhadap perilaku manajer dalam mengantisipasi manipulasi yang mungkin dilakukan sehingga dapat meningkatkan integritas laporan keuangan.

Cornet *et al.* (2006) dalam Efrianti (2012) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan menjadi lebih baik.

Susiana dan Herawaty (2007) menyatakan dengan kepemilikan institusional mendorong munculnya pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajer. Penelitian Oktadella dan Zulaikha (2010), dan Jama'an (2008) menyebut proporsi kepemilikan institusional berpengaruh secara positif terhadap integritas informasi laporan keuangan.

### **2.2.1.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Integritas Laporan Keuangan**

Kepemilikan perusahaan merupakan salah satu mekanisme yang dapat dipergunakan agar pengelola melakukan aktivitas sesuai kepentingan pemilik perusahaan. Kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen termasuk didalamnya dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya (Putra dan Muid, 2012).

Kepemilikan manajerial berperan dalam membatasi perilaku menyimpang dari manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme yang dapat diterapkan dalam meningkatkan integritas laporan keuangan. Dengan demikian, manajer pada perusahaan yang memiliki persentase kepemilikan manajerial akan cenderung memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menjalankan perusahaan, mengambil keputusan terbaik untuk kesejahteraan perusahaan dan melaporkan laporan keuangan dengan informasi yang benar dan jujur sehingga memiliki integritas laporan keuangan yang tinggi.

Jensen dan Meckling (1976:315) dalam Jama'an (2008) menyatakan bahwa kepemilikan saham manajerial dapat membantu menyatukan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, yang berarti semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Penelitian Perwirasari (2009) dan Hardiningsih (2010) menyebutkan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.



### 2.2.1.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya (Amin, 2008:49). Dalam hal pelaporan keuangan, peran dan tanggung jawab komite audit adalah memonitor dan mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar standar dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi, memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan kebijaksanaan tersebut dan apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit, serta menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal.

Peran komite audit erat kaitannya dengan *good corporate governance* dan dapat dijadikan tolak ukur sukses bagi suatu perusahaan. Komite audit merupakan pilar penting dalam penerapan *good corporate governance*, karena komite audit juga berperan dalam evaluasi laporan keuangan (Moh. Wahyudin Zarkasyi, 2008:22).

Dengan demikian komite audit dalam perusahaan dapat menjadi salah satu upaya dalam mengurangi kecurangan dalam penyajian laporan keuangan sehingga komite audit diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap tindakan manajemen yang memungkinkan untuk melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan yang mempengaruhi integritas laporan keuangan (Oktadella dan Zulaikha, 2010). Penelitian Putra dan Muid (2012), Oktadella dan Zulaikha (2010) dan Jamaan (2008) menyebutkan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

#### **2.2.1.4 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Integritas Laporan Keuangan**

Komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luar dan keseluruhan. Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait (Oktadella dan Zulaikha, 2010).

Komisaris independen dapat menjadi penengah apabila terjadi perselisihan diantara manajer internal dan mengawasi kebijakan-kebijakan manajer serta memberikan nasihat kepada manajemen. Dapat disimpulkan keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Jika perusahaan memiliki komisaris independen maka laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen cenderung lebih berintegritas, karena terdapat badan yang mengawasi dan melindungi hak-hak diluar perusahaan (Susiana dan Herawaty, 2007). Penelitian Jama'an (2008) menyebut proporsi komisaris independen berpengaruh secara positif terhadap integritas informasi laporan keuangan.

#### **2.2.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Integritas Laporan Keuangan**

Ukuran perusahaan sebagai besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Ketiga pengukuran

tersebut sering digunakan untuk mengidentifikasi besar kecilnya suatu perusahaan karena semakin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar modal yang ditanam. Semakin besar penjualan, maka semakin besar pula perputaran uang dalam perusahaan tersebut, dan semakin besar kapitalisasi pasar maka perusahaan tersebut semakin dikenal oleh masyarakat (Sudarmadji dan Sularto, 2007).

Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan yang lebih luas sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Semakin besar suatu perusahaan, maka perusahaan akan menghadapi biaya politik yang tinggi, perusahaan besar akan menghadapi tuntutan lebih besar dari para *stakeholder* untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan (Nuryaman, 2009).

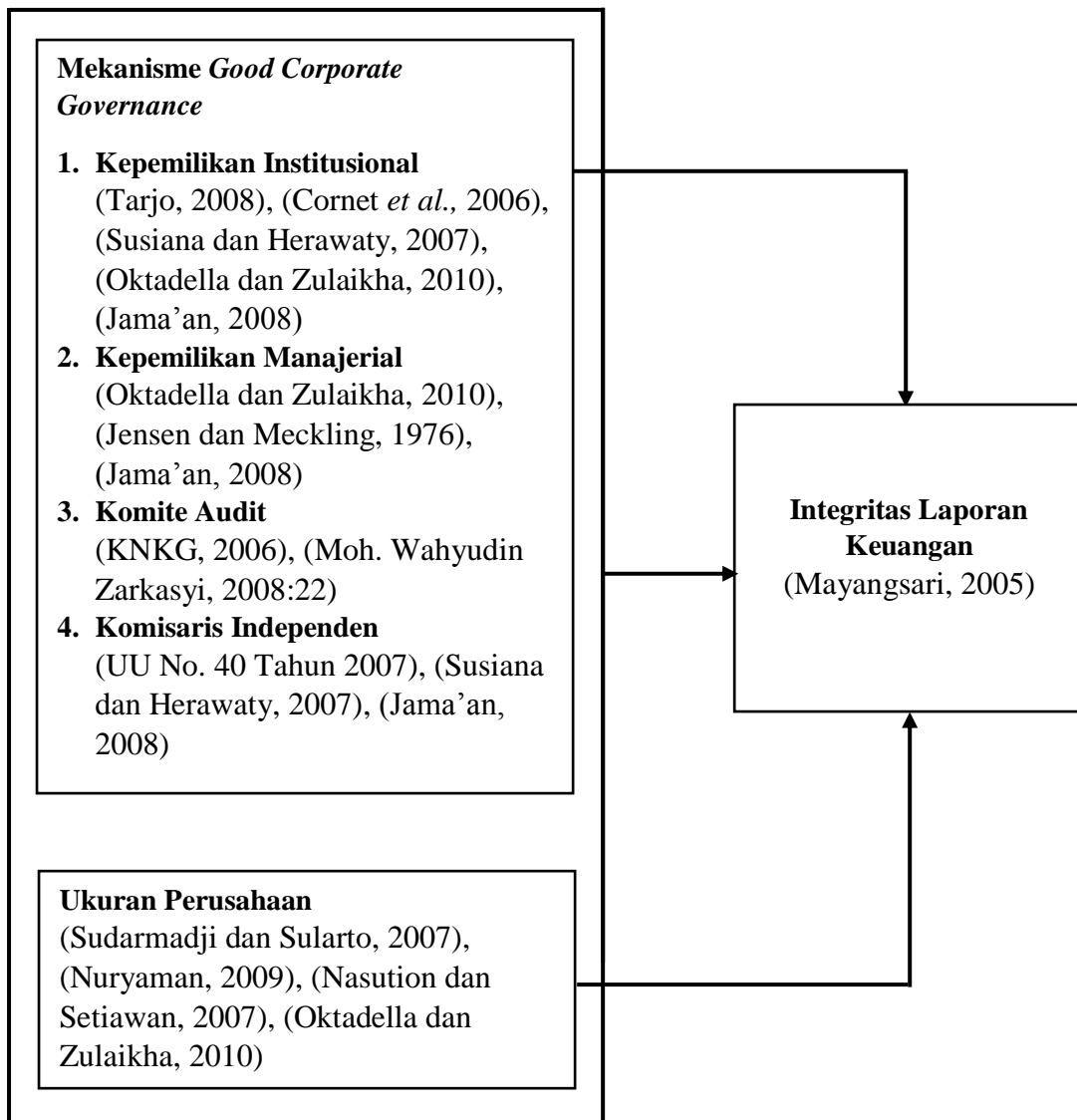
Ukuran perusahaan memiliki peranan penting dalam penyajian laporan keuangan dengan integritas yang lemah. Ukuran perusahaan yang kecil dianggap lebih banyak melakukan praktik manajemen laba daripada perusahaan besar. Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam saham perusahaan tersebut semakin banyak dan perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan. Berbeda dengan perusahaan kecil yang cenderung ingin memperlihatkan kondisi perusahaan yang selalu berkinerja baik agar investor menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut (Nasution dan

Setiawan, 2007). Penelitian Oktadella dan Zulaikha (2010) menyebutkan ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap integritas informasi laporan keuangan.

### **2.2.3 Skema Kerangka Berpikir**

Untuk membantu dalam memahami faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan diperlukan suatu kerangka pemikiran. Dari landasan teori yang telah diuraikan diatas, disusun alur pemikiran dari peneliti, kemudian digambarkan dalam kerangka berpikir.

Berikut ini merupakan kerangka pemikiran berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat dibuat sebuah kerangka pemikiran teoritis dari penelitian ini.



**Gambar 2.1**

**Paradigma Penelitian**

**2.2 Hipotesis Penelitian**

Pengertian hipotesis Sugiyono (2013:64) mendefinisikan hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.”

Berdasarkan kerangka pemikiran maka penulis menyimpulkan hipotesis sebagai berikut:

- H1 :Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.
- H2 :Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.
- H3 :Komite audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.
- H4 :Komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.
- H5 :Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.
- H6 :Mekanisme *good corporate governance* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan